



# PEMROV KALBAR 'KEBUT' INFRASTRUKTUR

**P**EMERINTAH Provinsi (Pemrov) Kalimantan Barat (Kalbar) terus menunjukkan komitmen dalam menangani kebutuhan infrastruktur masyarakat. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalbar, Iskandar Zulkarnaen, menyatakan tren pembangunan infrastruktur di Kalbar dalam beberapa tahun ke depan terus meningkat. Hal ini seiring dengan meningkatnya perhatian Pemerintah Provinsi Kalbar terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

• Baca Halaman 10

**Pembangunan infrastruktur di Kalbar trennya dalam beberapa tahun ke depan sampai saat ini meningkat. Karena adanya perhatian Pemerintah Provinsi terhadap infrastruktur yang semakin baik dan meningkat. Pemrov Kalbar memikirkan kebutuhan dasar masyarakat, ini sangat penting dan menjadi bagian dari komponen penunjang ekonomi masyarakat.**

**Iskandar Zulkarnaen**  
Kepala Dinas PUPR Kalbar



## Hal 9 ■ 'Kebut' Infrastruktur

"Pembangunan infrastruktur di Kalbar trennya dalam beberapa tahun ke depan sampai saat ini meningkat. Karena adanya perhatian Pemerintah Provinsi terhadap infrastruktur yang semakin baik dan meningkat. Pemprov Kalbar memikirkan kebutuhan dasar masyarakat, ini sangat penting dan menjadi bagian dari komponen penunjang ekonomi masyarakat," ujar Iskandar.

Menurutnya, perhatian terhadap infrastruktur saat ini semakin membaik dan diharapkan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan infrastruktur yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.

Iskandar menjelaskan bahwa ada sejumlah proyek strategis daerah yang menjadi prioritas utama, terutama proyek-proyek yang kondisinya sudah rusak berat dan sangat dibutuhkan masyarakat untuk akses mo-

bilisasi.

"Proyek-proyek prioritas kita adalah proyek strategis daerah yang menjadi skala prioritas. Artinya, sudah rusak berat dan memang dibutuhkan untuk akses mobilisasi masyarakat. Itu yang menjadi skala prioritas," ungkapnya.

Ia merinci sembilan kegiatan prioritas strategis daerah yang telah ditandai (tagging) dalam tahun anggaran 2025. Di antaranya peningkatan Jalan Marau - Air Upas, peningkatan Jalan Kota Baru - Nanga Soka, peningkatan Jalan Sayan - Soka - Kota Baru dan peningkatan Jalan Simpang Medang - Nanga Mau.

Selanjutnya peningkatan Jalan Sukadana - Teluk Batang, peningkatan Jalan Batas Kota - Subah, Jalan Tanjung - Marau, Jalan Ketapang - Pesaguan dan Jalan Pesaguan - Kendawangan.

"Jadi ada sembilan kegiatan prioritas strategis daerah yang sudah kita tagging di tahun anggaran 2025 ini," kata Iskandar.

Terkait efisiensi, Iskandar menyebut Dinas PUPR hanya sebagai operator. Mereka mengusulkan program, dan jika anggaran tersedia maka akan dilaksanakan. Namun, saat terjadi efisiensi, alokasi anggaran untuk Dinas PUPR ikut terdampak.

"Pada saat terjadi efisiensi, kita kehilangan anggaran kurang lebih Rp160 miliar. Itu baru dari pusat ke daerah. Kita mengandalkan APBD, lalu APBD juga terjadi efisiensi, banyak kegiatan yang hilang. Tapi berdasarkan kebutuhan di lapangan, banyak jalan rusak, keluhan masyarakat yang sering diungkapkan ke kami. Banyak longsor, banyak jembatan putus. Ini menjadi perhatian Pemerintah Provinsi untuk mem-

formulasikan anggaran dari pergeseran ke arah infrastruktur," jelasnya.

Iskandar menambahkan bahwa kepekaan Pemerintah Provinsi dalam mengalihkan anggaran ke sektor infrastruktur sangat dirasakan. Salah satu contoh adalah proyek IJD (Inpres Jalan Daerah) yang sebelumnya dialokasikan melalui DAK dan Dana Inpres, tetapi hilang akibat efisiensi berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025.

"IJD-nya hilang, DAK-nya hilang, semuanya hilang. Padahal kita tahu, banyak keluhan masyarakat, kecelakaan tunggal, kendaraan berat terguling. Itu semua bisa kita saksikan di media sosial. Maka pemerintah hadir atas kepekaan itu. Tahun ini, kami dialokasikan anggaran Rp26 miliar untuk mengembalikan kegiatan tersebut agar bisa ditangani di 2025," paparnya.

Kasus serupa juga terjadi di Teluk Batang. DAK yang sebelumnya dialokasikan hilang, sehingga Pemprov



kembali mengalokasikan anggaran melalui APBD.

"Karena kalau kita tunda, kerusakannya akan makin berat. Ada jembatan putus, jalan putus. Kalau menunggu kondisi normal anggaran, akan terjadi permasalahan sosial di tengah masyarakat. Maka ada tindakan Pemprov Kalbar melalui kebijakan anggaran untuk menangani hal itu," lanjutnya.

Iskandar tidak menampik bahwa tantangan lain juga muncul, salah satunya adalah proses pengadaan barang dan jasa. Prosedur yang ketat membuat waktu pelaksanaan menjadi terbatas.

"Semua tantangan itu ada. Kita coba menyikapi dengan mekanisme tanpa melanggar aturan atau pedoman yang ada. Tantangan paling besar adalah saat kita mengalokasikan anggaran melalui proses pengadaan barang dan jasa. Ini memakan waktu yang cukup

lama. Bukan berarti kami tidak menghargai proses ini, kami hormati. Ini bagian dari proses pemilihan yang objektif dan kompetitif. Tapi waktu pelaksanaannya jadi kurang," terangnya.

Ia mencontohkan tender ulang seperti yang terjadi di Teluk Batang. Proses tersebut, katanya, tetap harus dijalankan sesuai pedoman.

Selain itu, kondisi cuaca juga menjadi tantangan utama dalam menyelesaikan pekerjaan di lapangan.

"Cuaca menjadi tantangan kami untuk membuat rekayasa metode yang lebih efektif dan efisien. Tentunya tidak bertentangan dengan isi kontrak," ujarnya.

Iskandar juga mengajak masyarakat untuk ikut merawat infrastruktur yang telah dibangun pemerintah. Ia menegaskan bahwa pemeliharaan tidak selalu membutuhkan anggaran besar, melainkan cukup dari kepedulian warga.

"Kami berharap, saat kita telah membangun, masyarakat punya kepekaan untuk peduli dan ikut memelihara. Kami tidak menuntut banyak. Tapi misalnya saat bahu jalan ditumbuhi rumput tinggi, masyarakat bisa bergotong royong menebasnya agar bahu jalan tidak lebih tinggi dari badan jalan. Itu bisa mencegah genangan air yang merusak jalan," jelasnya.

Ia juga mengingatkan agar pengguna jalan tidak abai saat melihat jalan berlubang. Jika memungkinkan, bisa ditutup sementara untuk menghindari kerusakan yang lebih parah.

"Karena jalan itu dibangun dari pajak masyarakat. Kalau kita ikut berpartisipasi, beban perbaikannya juga bisa berkurang. Anggaran yang tersedia bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat lainnya," pungkas Iskandar. (din/bob)